

Combine Resource Institution

COMMUNITY
MEDIA

SID BERDA

DIGITAL
LITERACY

Laporan Tahunan 2019 Annual Report 2019

Penulis/Writer
Lamia Putri Damayanti

Penyunting/Editor
Ferdi F. Putra
Imung Yuniardi

Penerjemah/Translator
Krisnia Rahmadany

Tata Letak/Layouter
Adji Satria

Foto/Photo
Dokumentasi CRI, BaleBengong

Combine Resource Institution

Jalan KH Ali Maksum 462
Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55188
Telp/Fax: 0274-411123
Email: office@combine.or.id
Website: www.combine.or.id

Facebook: /combineresourceinstitution
Twitter: @combineRI
Youtube: /combineresourceinstitution
Instagram: @combineRI
WhatsApp: +62 81 804 389 000

Daftar Isi

Pengantar

Konsisten Mendorong Produksi Informasi Berbasis Warga	4
1. Media Komunitas dan Kontribusinya bagi Warga	10
A. Penelitian: Media Komunitas dan Ruang Publik	12
B. AJW 2019: Mengapresiasi Media Komunitas dan Pewarta Warga	16
C. Bukan Sekadar Memberitakan, Media Komunitas Kelola Pengetahuan	20
2. SID Berdaya: Wujudkan Satu Data dari Desa	24
3. Literasi Digital: Memberdayakan Perempuan, Memangkas Kesenjangan Digital	32
4. Griya Jagadhaya	40

Lampiran

Laporan Keuangan Combine Resource Institution 2019	44
--	----

Dewan Pembina dan Staff

Table of Contents

Introduction

Consistently Encouraging the Production of Community-Based Information	5
--	---

1. Community Media Contribution to Its Citizens

A. Research: Community Media and Public Sphere	13
B. AJW 2019: Appreciating Community Media and Citizen Journalists	17
C. Not Merely Reporting, Community Media Manage Knowledge	21

2. SID Berdaya: Toward One Data from Village

3. Digital Literacy: Empowering Women, Bridging Digital Divide

4. Griya Jagadhaya

Attachment

Combine Resource Institution 2019 Financial Report	45
--	----

Board of Trustees and Staff

Konsisten Mendorong Produksi Informasi Berbasis Warga

Hampir dua dekade berlalu, dan kami masih konsisten mendorong warga menjadi berdaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kami meyakini bahwa informasi adalah salah satu modal utama warga untuk mengambil keputusan yang tepat demi kelangsungan hidupnya. Maka, pengelolaan informasi berbasis warga adalah pondasi.

Pada 2019, ada tiga ranah yang kami kerjakan untuk memperkuat pondasi tersebut: media komunitas, sistem informasi desa, dan literasi digital.

Media komunitas adalah isu yang telah lama kami geluti, bahkan sejak awal lembaga ini berdiri. Selain penguatan kapasitas untuk pegiat media komunitas dan pewarta warga, tiga tahun terakhir kami mulai mendorong pengakuan negara atas media komunitas sekaligus perlindungan hukum bagi pewarta warganya. Kami yakin sesedikit apapun secara kuantitas, masih ada media komunitas yang benar-benar berkontribusi dalam literasi maupun demokrasi informasi bagi warga di akar rumput. Mereka inilah yang sangat membutuhkan pengakuan dan perlindungan, alih-alih dituding sebagai salah satu media penyebar hoaks.

Consistently Encouraging the Production of Community- Based Information

Nearly two decades have passed, yet we are still consistently encouraging citizens to be empowered by using information and communication technology. We believe that information is one of the main assets of citizens to make the right decisions for their well-being. Thus, community-based information management is the foundation.

In 2019, there are three domains we are working on to strengthen this foundation: community media, village information systems, and digital literacy.

Community media is an issue that we have been dealing with for a long time, even from the beginning of this institution. In addition to strengthening the capacity for community media activists and citizen journalists, these last three years we have begun to encourage state recognition of community media as well as legal protection for their citizen journalists. We believe that even in the slightest quantity, there is still community media that really contributes to literacy and information democracy for grassroots. They really need recognition and protection, instead of being accused as one of the media that spread hoaxes.

Sementara itu, pengembangan aplikasi sistem informasi desa yang kami prakarsai sejak 2009 juga terus mengalami progres. Setelah berhasil mematangkan konsep-konsep dasar terkait tata kelola data dan informasi, kami mulai mengkaji hak kekayaan intelektual semata agar bisa memastikan tercapainya manfaat bagi warga dan pemerintah sekaligus meminimalisir pendekatan proyek demi kepentingan sesaat pihak-pihak tertentu. Pada 2018, aplikasi yang kami kembangkan resmi memiliki merek "Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya", dan akhirnya tahun lalu aplikasi di level daerahnya juga telah tercatat secara resmi sebagai "Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB)".

Meanwhile, the development of the village information system application that we have initiated since 2009 has also continued to show progress. After successfully finalizing the basic concepts related to data and information governance, we began to study intellectual property rights in order to ensure citizens and the government will be benefited while minimizing the project approach for the momentary interests of certain parties. In 2018, the application that we developed had the official brand "Sistem Informasi Berdaya (SID Berdaya)", and finally last year the application at the local level was also officially registered as "Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB)".

“

Kami meyakini bahwa informasi adalah salah satu modal utama warga untuk mengambil keputusan yang tepat demi kelangsungan hidupnya. Maka, pengelolaan informasi berbasis warga adalah pondasi.

Pada 2019, ada tiga ranah yang kami kerjakan untuk memperkuat pondasi tersebut: media komunitas, sistem informasi desa, dan literasi digital.

“

We believe that information is one of the main assets of citizens to make the right decisions for their well-being. Thus, community-based information management is the foundation.

In 2019, there are three domains we are working on to strengthen this foundation: community media, village information systems, and digital literacy.

”

Dalam konteks tata kelola data, kami mendorong pengintegrasian data dari desa dengan sistem data pusat. Tagline "Satu Data dari Desa" memang kami yakini mampu menghasilkan data yang akurat sekaligus partisipatif, sehingga keadilan atas data tetap ada di tangan warga dan sejalan dengan prinsip tata kelola data yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pada 2019, model integrasi data tersebut mulai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara proaktif mengajukan integrasi data yang ada di SIKAB dengan dua sistem data di pemerintah pusat, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kami berharap "Satu Data dari Desa" ini dapat menjadi salah satu rujukan agregasi dan integrasi data di Indonesia demi tercapainya satu data yang sesungguhnya.

Ranah lain yang kami seriusi sejak dua tahun terakhir adalah literasi digital. Fokus pada *data governance* dan media komunitas selama ini, membawa kami pada keyakinan akan pentingnya isu literasi digital. Kami memilih untuk memperkuat kelompok warga terkait isu literasi digital ini, terutama mengenai keamanan, privasi, dan data pribadi di internet.



In the context of data management, we encourage the integration of data from villages with a central data system. We believe that the tagline "One Data from Village" can produce accurate and participatory data. Therefore, the sovereignty of the data remains in citizens' hand and in line with the data governance principles set by the central government.

In 2019, the data integration model took a start. Gunungkidul Regency Government proactively proposed integration between existing data in SIKAB and two data systems in the central government, namely the Social Welfare Information System - Next Generation (SIKS-NG) and the Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK). We hope that "One Data from Village" can be a reference for data aggregation and integration in Indonesia for the achievement of one true data.

Another area we have taken seriously in the last two years is digital literacy. The focus on data governance and community media so far have led us to believe in the importance of digital literacy issues. We chose to strengthen the citizens group related to digital literacy issue, especially in regard to security, privacy and personal data on the internet.



• 1

Media Komunitas dan Kontribusinya bagi Warga



Media komunitas merupakan salah satu wujud pengelolaan informasi berbasis warga yang sejak awal kami dorong eksistensi dan penguatannya. Ada banyak ragam definisi media komunitas--atau kadang kami sebut media warga, namun definisi yang kami anut adalah adalah media yang dibangun oleh, dari, dan untuk komunitas, yang diperuntukkan sebagai wahana penyampaian informasi mengenai berbagai peristiwa maupun persoalan yang dihadapi warga dengan menerapkan prinsip jurnalistik dalam proses produksinya. Aktivitas media komunitas merupakan wujud dari penegakkan hak warga atas informasi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk dapat mencapai rumusan tersebut, media komunitas harus memiliki sejumlah karakter, antara lain: partisipatif, berfokus pada isu lokal, berpihak pada kepentingan warga, memosisikan warga sebagai subjek

• 1

Community Media Contribution to Its Citizens



Community media is a form of community-based information management that we push for its existence and strengthen from the very beginning. There are many different definitions of community media--or what we sometimes call citizens' media. However, the definition of community media that we adhere to use is media that was built by, from, and for the community, which is intended as a means for delivering information about various events and problems faced by citizens by applying the principle journalism in the production process. Community media activities are a manifestation of upholding citizens' rights to information guaranteed by the 1945 Constitution.

In order to achieve this, community media must have a number of characters, which are participatory, focusing on local issues, taking side in the interests of citizens, positioning citizens as subjects of news,

berita, dikelola bersama semua peginatnya, tidak mencari keuntungan berlebih (nonprofit), dan jangkauan terbatas (spesifik) pada komunitas tertentu. Media komunitas dikelola oleh pegiat yang berkontribusi secara sukarela, independen, menerapkan etika jurnalistik, serta terlibat dalam upaya mencari solusi atas persoalan warga. Tentu kami tidak mengarang sendiri definisi tersebut, melainkan merujuk pada konvensi para pakar di bidang kajian media komunitas serta dikontekstualisasikan dengan aspek jurnalisme dan koridor konstitusi Indonesia.

Pada tahun 2019, setidaknya kami melakukan tiga hal utama dan signifikan untuk gerakan ini. Pertama adalah penelitian sebagai salah satu upaya untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan media komunitas. Kedua, upaya advokasi kebijakan pengakuan media komunitas dan perlindungan pewartawan di level pusat. Ketiga, penguatan kapasitas melalui gelaran Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) 2019, berkolaborasi dengan media warga BaleBengong, yang telah menggelar AJW sejak 2016. Tentu, hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi kami.

A. Penelitian: Media Komunitas dan Ruang Publik

Tidak banyak penelitian yang mengambil fokus pada peran media komunitas secara umum--biasanya dikaitkan secara terbatas dengan isu-isu sektoral, seperti, kebencanaan. Meski bukan lembaga *research based*, kami merasa perlu untuk melakukan kajian tersebut mengingat hasilnya cukup penting sebagai pijakan bagi semua pihak untuk melihat media komunitas dari perspektif yang sama.

Sebelumnya pada 2016, kami telah melakukan penelitian mengenai adaptasi media komunitas terhadap kehadiran internet. Saat itu, sebagaimana organisasi media lainnya, kami melihat media komunitas juga mengalami transisi menuju media baru. Hasil riset saat itu menyebutkan sebagian media komunitas berhasil beradaptasi dengan mulus, sebagian lagi perlu usaha ekstra untuk menyesuaikan diri.

Penelitian kali ini dilakukan untuk melihat sejauh mana media komunitas telah memberi dampak positif bagi warga, terutama dalam menyediakan ruang publik--yang pada akhirnya memperbaiki kualitas demokrasi dan kehidupan warga di akar rumput, dengan mengadopsi konsep ruang publik yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas sebagai kacamata analisis.

Dengan memilih dua media komunitas sebagai *sample*, temuan penelitian menunjukkan bahwa media komunitas telah berhasil dan masih konsisten menyediakan ruang publik alternatif bagi warga komunitasnya--berkebalikan dengan media komersial.

managed by all of the organizers, not seeking excessive profits (non-profit), and limited reach (specific) to a particular community. Community media is managed by activists who contribute voluntarily, independently, apply journalistic ethics, and engage in efforts to find solutions to citizens' problems. Definitely we do not make the definition ourselves, but rather refer to the conventions of experts in the field of community media studies and contextualize it with the journalism aspect and Indonesian constitution.

In 2019, we did at least three major and significant things for this movement. First is research as an effort to contribute to the development of science related to community media. Second, we conducted advocacy related to community media recognition policy and protection of citizen journalists at the central level. The third is capacity building through the 2019 Anugerah Jurnalisme Warga (AJW), in collaboration with BaleBengong as a citizen media, which has been holding AJW since 2016. Undeniably, this is something new for us.

A. Research: Community Media and Public Sphere

Not many researchers have focused on the role of community media in general--it is usually limited to sectoral issues, such as disaster topic. Although we are not a research-based institution, we feel the need to conduct the study considering the results are quite important as a basis for all parties to view community media from the same perspective.

Previously in 2016, we conducted research on adaptation of community media toward internet presence. At that time, like other media organizations, we saw that community media are also experiencing a transition to new media. Research results at the time showed that some community media managed to adapt smoothly, some needed extra effort to adjust.

This research was conducted to see the extent to which community media has had a positive impact on citizens, especially in providing public sphere--which ultimately improves the quality of democracy and the lives of citizens at the grassroots, by adopting the concept of public sphere introduced by Jurgen Habermas as an analytical lens.

By selecting two community media as samples, the research findings show that community media have succeeded and are still consistently providing alternative public sphere for the community--in contrast to commercial media.

Berawal dari interaksi di ruang publik yang disediakan media komunitas, muncul berbagai prakarsa perubahan baik skala mikro maupun makro. Temuan lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa media komunitas telah bekerja sesuai koridor jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Temuan ini dapat mematahkan anggapan bahwa media komunitas merupakan media abal-abal yang cenderung menyebarkan disinformasi atau hoaks. Hingga kini, media komunitas belum terakomodasi dalam undang-undang tentang pers. Hal ini menjadikan media komunitas dalam posisi rentan.

Sejak hoaks merajalela, media komunitas menjadi salah satu pihak yang disangka sebagai sumber atau penyebar disinformasi. Dalam regulasi, meski tidak disebutkan secara eksplisit, media komunitas berada pada kategori yang sama dengan media abal-abal, yakni sebagai kategori media non-profesional. Dalam beberapa kesempatan, untuk merespons maraknya hoaks, Dewan Pers merekomendasikan untuk 'mengembalikan otoritas pemegang kebenaran faktual kepada media mainstream' dan menghindari media-media yang 'belum terverifikasi Dewan Pers'.

Pernyataan tersebut memiliki konsekuensi, bahwa media selain yang terverifikasi Dewan Pers, tidak layak dirujuk, termasuk media komunitas. Meski Dewan Pers telah berupaya menempatkan media komunitas dalam kategori media yang 'cukup layak', posisi media komunitas masih tetap rentan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk menentukan langkah strategis model pengembangan media komunitas kiwari. Selain itu, penelitian ini juga menjadi modal dalam upaya advokasi perlindungan hukum bagi media komunitas.

Starting with interaction in the public sphere provided by community media, various micro and macro-scale change initiatives emerged. Other findings from this study also show that community media have worked according to the journalistic corridors prevailing in Indonesia. This finding can break the assumption that community media is a fake media that tends to spread disinformation or hoaxes. Until now, community media has not been accommodated in the Press Act. This makes community media in a vulnerable position.

Since hoaxes are rampant, community media has become one of the parties suspected as the source or disseminator of disinformation. In regulation, although it is not explicitly mentioned, community media are in the same category as fake media, namely as a non-professional media category. On several occasions, in response to the rampant hoaxes, the Press Council recommends 'returning the authority of factual truth holders to the mainstream media' and avoiding media that are 'not yet verified by the Press Council'.

The statement has the consequence that media other than those verified by the Press Council are not worthy of reference, including community media. Even though the Press Council has tried to place community media in the 'decent enough' media category, the position of community media remains vulnerable.

The results of this study are expected to be a reference for determining the strategic steps of the contemporary community media development model. In addition, this research is also an asset in advocating legal protection for community media.

“

Penelitian kali ini dilakukan untuk melihat sejauh mana media komunitas telah memberi dampak positif bagi warga, terutama dalam menyediakan ruang publik--yang pada akhirnya memperbaiki kualitas demokrasi dan kehidupan warga di akar rumput, dengan mengadopsi konsep ruang publik yang diperkenalkan oleh Jurgen Habermas sebagai kacamata analisis.

”

“

This research was conducted to see the extent to which community media has had a positive impact on citizens, especially in providing public sphere--which ultimately improves the quality of democracy and the lives of citizens at the grassroots, by adopting the concept of public sphere introduced by Jurgen Habermas as an analytical lens.

”

B. AJW 2019: Mengapresiasi Media Komunitas dan Pewarta Warga

Produksi informasi oleh warga semakin masif seiring perkembangan teknologi. Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya tren produksi informasi berbasis warga dalam dekade terakhir. Teknologi digital memudahkan siapa pun membuat dan menyebar berita dalam beragam bentuk secara cepat dan luas. Harus diakui, tidak sedikit informasi yang tersebar berbasis kebohongan dan tak berguna untuk kepentingan publik. Namun tidak sedikit pula yang tetap menghasilkan informasi dengan kualitas yang baik dan membawa dampak positif bagi lingkungannya.

Semangat inilah yang menjadi motif penyelenggaraan Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) oleh BaleBengong. Media warga yang berbasis di Bali tersebut meyakini bahwa produksi informasi oleh warga perlu diapresiasi. AJW digelar sejak 2016 di Denpasar, Bali, sebagai wadah apresiasi bagi warga yang berkomitmen untuk konsisten memproduksi informasi di tengah hiruk-pikuk pemberitaan yang cenderung berorientasi pada pasar dan politik kekuasaan.

Keterlibatan CRI untuk bekerja bersama di AJW 2019 melahirkan tema “*Jer Basuki Mawa Desa*.” Tema ini menitikberatkan desa sebagai sumber utama cerita sekaligus tempat menempa warga agar berdaya di tengah arus informasi yang makin deras. Sebab warga desa kerap hanya menjadi obyek “pemasaran” beragam produk informasi. Padahal, dengan makin diakuinya eksistensi desa, maka warga desa pun mesti menjadi subjek yang mampu memproduksi informasi sesuai kebutuhan dan kepentingannya yang khas.

Warna keterlibatan kami pada AJW 2019 adalah munculnya apresiasi kepada media warga, melengkapi dua kategori lain yaitu pewarta warga dan pegiat literasi digital. Sejak pendaftaran dan penominasian dibuka pada April 2019, terdapat 111 yang mengirimkan karya maupun usulan. Daftar tersebut terdiri dari 31 kelompok media warga, 31 orang pewarta warga, dan 49 individu/kelompok pegiat literasi digital. Pengumuman pemenang sekaligus malam penganugerahan AJW 2019 digelar pada 29 Juni 2019.

Yang membedakan media komunitas dengan media arus utama maupun media lain yang menyebut diri sebagai media warga, meski mempraktikkan hal yang bertolak belakang, terletak pada prinsip keterlibatan, kepemilikan sekaligus kepentingan. Media warga yang tumbuh bersama serta berbasis kebutuhan dan kepentingan warganya akan membawa dampak berkelanjutan yang lebih nyata. Hasil AJW 2019 memberikan contoh konkret tentang itu. Misalnya, ketika kita menengok Warta Desa di Pekalongan dan Radio Komunitas Marsinah FM di Jakarta yang memenangkan kategori media warga.

Selain puncak acara berupa pengumuman pemenang AJW 2019, kami juga menggelar Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) bertema “Merancang Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pewarta dan Media Warga” pada 29 Juni 2019. Berbagai elemen masyarakat hadir ikut urun rembuk melalui pengalaman-pengalaman yang dibagikan; berbagi saran; hingga menyatakan komitmen untuk tetap

B. AJW 2019: Appreciating Community Media and Citizen Journalist

The production of information by citizens is increasingly massive as technology develops. This phenomenon can be seen from the increasing trend of community-based information production in the last decade. Digital technology makes anyone easily create and spreads the news in various forms quickly and broadly. Admittedly, a lot of information is spread based on lies and is not useful for public interest. However, on the other hand, a lot of good quality information is still produced and brings a positive impact on the community.

This spirit is the motive for organizing the Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) by BaleBengong. BaleBengong, a Bali-based citizen media, believes that the production of information by citizens needs to be appreciated. AJW has been held since 2016 in Denpasar, Bali, as a place of appreciation for citizens who are committed to consistently producing information amid the hustle and bustle of news that tends to be market-oriented and power politics.

CRI's involvement in collective working during AJW 2019 resulted in the birth of a theme “*Jer Basuki Mawa Desa*.” This theme emphasizes the village as the main story source as well as a place to forge villagers to be empowered in the midst of an increasingly swift flow of information. Villagers often only become marketing objects for various information products. Whereas, by getting more recognition for village's existence, villagers must also be subjects who are able to produce information according to their specific needs and interests.

The trace left from our involvement in AJW 2019 is the emergence of appreciation for ‘citizen media’, completing two other categories, ‘citizen journalist’ and ‘digital literacy activist’. Since registration and nomination opened in April 2019, there have been 111 submissions of work and proposals. The list consists of 31 citizen media groups, 31 citizen journalists, and 49 individuals/digital literacy activist groups. The announcement of the winners, as well as the AJW 2019 awarding night, were held on 29 June 2019.

What distinguishes community media from mainstream media and other media that call themselves citizens media, even though they practice the opposite, lies in the principle of involvement, ownership as well as interests. Citizen media that grow together and are based on the needs and interests of their citizens will have a more tangible, sustainable impact. The results of AJW 2019 provide a concrete example of this notion. It is shown when we read Warta Desa in Pekalongan and Marsinah FM Community Radio in Jakarta, which won the citizen media category.

In addition to the event highlight in form of the announcement of AJW 2019 winner, we also held a focus group discussion on “Designing Legal Protection Forms for Media and Citizen Journalist” on 29 June 2019.

berjuang memberdayakan warga di sekitarnya melalui media yang dikelola. Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk mendorong Dewan Pers dan pengambil kebijakan terkait lainnya untuk membuktikan keberpihakannya pada warga secara riil dalam konteks tata kelola informasi.

Various elements of the community attended the discussion to take counsel through shared experience; share advice; to declare a commitment to keep fighting to empower the surrounding community through managed media. The results of this discussion will later become one of the materials to encourage the Press Council and other relevant policymakers to prove their real alignments with citizens in the information governance context.



○ Penyelenggaraan Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) di Taman Baca Kesiman, Denpasar, Bali pada 29 Juni 2019. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari warga setempat, mahasiswa, dan pegiat media warga dari berbagai daerah.

○ The holding of the Citizen Journalism Award (AJW) at the Kesiman Community Librari, Denpasar, Bali on June 29, 2019. This activity involved various elements of society ranging from local residents, students, and citizen media activists from various regions.



For further information:



SCAN ME

“

Keterlibatan CRI untuk bekerja bersama di AJW 2019 melahirkan tema “*Jer Basuki Mawa Desa.*” Tema ini menitikberatkan desa sebagai sumber utama cerita sekaligus tempat menempa warga agar berdaya di tengah arus informasi yang makin deras.

”

“

CRI’s involvement in collective working during AJW 2019 resulted in the birth of a theme “*Jer Basuki Mawa Desa.*” This theme emphasizes the village as the main story source as well as a place to forge villagers to be empowered in the midst of an increasingly swift flow of information.

”

C. Bukan Sekadar Memberitakan, Media Komunitas Kelola Pengetahuan

Speaker Kampung adalah salah satu media komunitas yang menjadi mitra kami sejak 2015. Kami telah mendampingi dan menyaksikan bagaimana media komunitas ini berkembang. Media komunitas yang berlokasi di Desa Ketingga, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB, tersebut aktif memproduksi konten-konten lokal. Tidak hanya tentang pelayanan publik dan persoalan sosial yang terjadi di sekitarnya, mereka juga memproduksi konten-konten mengenai budaya dan tradisi setempat. Speaker Kampung menulis isu-isu lokal di website mereka, www.speakerkampung.net, yang dibaca dan dibagi ulang rerata 100 kali, angka yang cukup lumayan untuk sebuah media komunitas. Selain itu, mereka juga mempunyai saluran YouTube yang sampai saat ini menjadi wadah bagi 200-an video yang mereka produksi.

Hal ini tentu menjadi modal bagus bagi Speaker Kampung untuk berkembang. Tidak sekadar sebagai produsen berita, namun juga mengambil peran dalam pengelolaan pengetahuan lokal. Pada 2019, kami mendampingi proses penguatan kapasitas para pegiat Speaker Kampung pada aspek pengelolaan pengetahuan melalui pelatihan pembuatan produk informasi audio visual. Tidak semata bertujuan untuk menghasilkan produk infomasi berupa video, kegiatan ini juga disertai dengan peningkatan kemampuan memetakan isu kolektif, pembentukan jejaring, dan merancang perencanaan produksi video untuk advokasi terkait persoalan sosial di sekitarnya. Target besarnya adalah menjadikan Speaker Kampung sebagai media komunitas yang mampu berperan sebagai salah satu sentra produksi dan pengelola pengetahuan lokal, serta penggerak advokasi untuk mendorong perubahan sosial di komunitasnya.

C. Not Merely Reporting, Community Media Manage Knowledge

Speaker Kampung is one of the community media that has become our partners since 2015. We have accompanied and witnessed how this community media develops. The community media, which is located in Ketingga Village, Suela District, East Lombok, West Nusa Tenggara (NTB), is actively producing local content. Not only about public services and social issues that occur around them, but they also produce content about local culture and traditions. Speaker Kampung writes local issues on their website, www.speakerkampung.net, which is read and re-shared approximately 100 times, a figure which was quite good for a community media. In addition, they also have a YouTube channel which until now has been a place for their 200 videos content.

This is certainly a good asset for Speaker Kampung to develop. Not just as a newsmaker, but they also take a role in managing local knowledge. In 2019, we assisted Speaker Kampung to strengthen their capacity related to knowledge management through training about the production of audio-visual information products. The aim is not only to produce information products in the form of videos, but the training also increases their ability to map collective issues, the formation of networks, and designs video production planning for advocacy related to surrounding social issues. The big target is to make Speaker Kampung as a community media which is capable of being the production centers and managers of local knowledge, as well as an advocacy drive to encourage social change in their community.

“

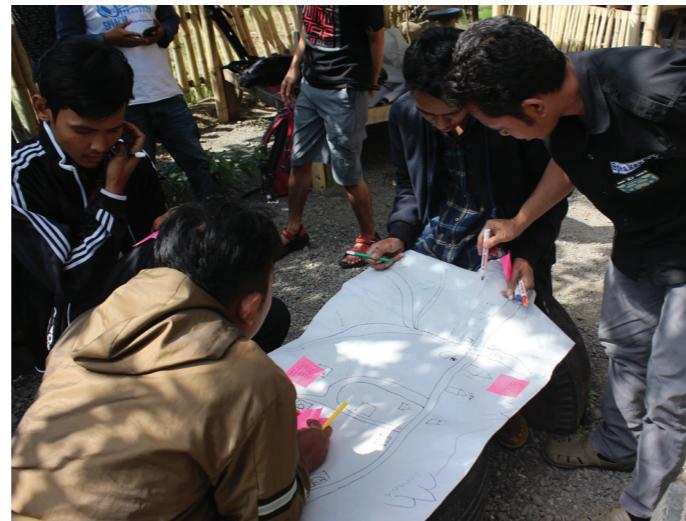
Tidak sekadar sebagai produsen berita, namun juga mengambil peran dalam pengelolaan pengetahuan lokal.

”

“

Not just as a newsmaker, but they also take a role in managing local knowledge.

”



- Suasana lokakarya pelatihan pengelolaan pengetahuan melalui pelatihan pembuatan produk informasi audio visual bersama Speaker Kampung dan Engage Media. Kegiatan ini dilaksanakan pada September 2019.

- The situation of the knowledge management training workshop activities through training in making audio visual information products with Speaker Kampung and Engage Media. This activity was carried out in September 2019.

• 2

• 2

SID Berdaya: Wujudkan Satu Data dari Desa

Rujukan data yang tidak tunggal menjadi persoalan utama dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, termasuk yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Perbedaan data kemiskinan di setiap kementerian dan lembaga selalu menimbulkan masalah ketika diimplementasikan ke level pemerintahan di bawahnya, terutama yang paling bawah yaitu desa.

Tahun 2019 akhirnya muncul regulasi pertama tentang satu data, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan dua regulasi yang diharapkan akan mampu mengatasi persoalan data yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tahun 2019 pula kami bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akhirnya berhasil mewujudkan secara bertahap integrasi data di Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) dengan sistem data yang dimiliki kementerian yaitu SIKS-NG dan PIS-PK. SIKAB merupakan agregasi data dari Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang ada di 144 desa se-Kabupaten Gunungkidul, yang prosesnya telah dirampungkan sejak 2018.

SID Berdaya: Toward One Data from Village

Non-single data reference is a major problem in public policy decision making, including those related to poverty alleviation programs. The different poverty data in each ministry and institution always creates problems when the related policy is implemented at the lower levels of government, especially at the lowest level, namely villages.

In 2019 the first regulation on one data finally emerged, namely Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Presidential Regulation Number 39 of 2019) concerning Satu Data Indonesia. Previously, the government has also issued two regulations that are expected to be able to overcome data problems namely, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Government Regulation Number 17 of 2017) concerning Synchronization of Planning and Budgeting Processes and Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (Presidential Regulation Number 95 of 2018) concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE).

In 2019, our institution and Gunungkidul Regency Government finally managed to gradually integrate data in the Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) with the data systems owned by the ministry, namely SIKS-NG and PIS-PK. SIKAB is an aggregation of data from the Sistem Informasi Berdaya (SID) in 144 villages throughout Gunungkidul Regency, whose process itself has been completed since 2018.

Meski regulasi di level nasional sudah mengamanatkan dimulainya proses integrasi data, namun ternyata belum ada langkah konkret, termasuk belum ada model agregasi dan integrasi yang bisa dirujuk. Merespon situasi tersebut, kami bersama Kabupaten Gunungkidul menggelar Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) bertema, "Satu Data Kemiskinan: Bagaimana Mencapainya dan untuk Siapa?" di Hotel Ibis, Jakarta, pada Selasa, 24 September 2019.

FGD ini melibatkan para pihak, di antaranya, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Wakil Bupati Gunungkidul, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuan diselenggarakannya FGD ini adalah untuk mendorong komitmen dari kementerian/lembaga terkait untuk melegitimasi data kemiskinan terpadu di kabupaten sebagai rujukan sasaran program pengentasan kemiskinan dari APBDes, APBD hingga APBN.

Selain itu, FGD ini juga bertujuan untuk memetakan konsep integrasi data dari para kementerian/lembaga dan aktor terkait, serta mengidentifikasi skema monitoring dan evaluasi prakarsa satu data yang ditawarkan para peserta untuk mengawal proses dan capaian penanganan fakir miskin, terutama dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

FGD ini bagian dari advokasi kami mendorong kebijakan tentang satu data yang jelas dan tegas, tidak hanya di atas kertas. Tidak mudah memang, sebab pendekatan yang dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait data kemiskinan perlu strategi yang berbeda, baik selama FGD maupun proses diskusi sebelum dan sesudah FGD. Kesimpulan kami, memang masih butuh proses panjang untuk mencapai pemahaman yang sama tanpa mendahulukan ego sektoral masing-masing.

Dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih pendataan, sebenarnya beberapa daerah telah mampu mengisi kekosongan dan ketidakpastian dalam soal data, melalui model yang mereka kembangkan sendiri. Salah satunya Kabupaten Gunungkidul.

Model yang dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul secara syarat dan teknis data, tidaklah bertentangan dengan semua prinsip yang dimuat dalam ketiga regulasi tadi, termasuk regulasi teknis lain mengenai pendataan. Model satu data yang dikembangkan sekaligus memenuhi prinsip dalam UU Desa, sebab yang dianut adalah integrasi data dari desa.

Sebenarnya sejak 2018 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah mulai memperbaiki perencanaan pengentasan kemiskinan dengan merujuk pada data yang sama, yaitu yang ada di SIKAB.

Selain pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih baik, desa dan kabupaten pada akhirnya memiliki kesadaran dan kesepakatan bahwa pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang lebih baik tidak akan tercapai tanpa keterbukaan data kemiskinan. Keterbukaan artinya desa dan kabupaten menentukan

Although regulations at the national level have mandated the commencement of data integration process, there have not been any concrete steps, including no aggregation and integration models that can be referred to. Responding to this situation, our institution and Gunungkidul Regency Government held a Focus Group Discussion (FGD) with the theme, "One Poverty Data: How to Achieve it and for Whom?" at Ibis Hotel, Jakarta, on Tuesday, 24 September 2019.

This FGD involved some parties, including the Presidential Staff Office (KSP), Deputy Regent of Gunungkidul, the National Development Planning Agency (BAPPENAS), the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Internal Affairs. The aim of this FGD is to encourage commitment from relevant ministries/institutions to legitimize integrated poverty data in regency as a reference for program targets of poverty alleviation from APBDes, APBD to the APBN.

In addition, this FGD also aims to map data integration concepts from relevant ministries/institutions and related parties, as well as identify monitoring and evaluation schemes for one data initiative offered by participants to oversee the process and achievements of handling the poor, especially in development planning at the regional level.

This FGD is part of our advocacy to encourage policies on one clear and decisive data, not just on paper. It is not easy indeed, because the approach applied with ministries/institutions related to poverty data needs a different strategy, during the FGD and the discussion process before and after FGD. We conclude that it still needs a long process to reach the same understanding without prioritizing each sectoral ego.

Regarding overlapping data, some regions actually have been able to fill in the gaps and uncertainties in the matter of data, through their own developed models. One of them is Gunungkidul Regency.

The model developed in Gunungkidul Regency regarding the terms and technical data, does not contradict with all the principles contained in the three regulations, including other technical regulations related to data collection. The one data model that is still developed at the same time fulfills the principles in Village Law, because what is adopted is the integration of data from the village.

Actually, since 2018, Gunungkidul Regency Government has begun to improve poverty alleviation planning by referring to the same data, which is provided in SIKAB.

In addition to using data for better planning, villages and regencies ultimately have awareness and agreement that poverty alleviation and better development will not be achieved without disclosure of poverty data. Openness means that villages and regencies work together to determine all indicators, methods of assessment, and the application of social culture elements in the data. This model does not exist nationally, because the determination of poverty ranking and recipients of social assistance until now only known by the managing institution.



bersama seluruh indikator, cara penilaian, berikut penerapan elemen kultur sosial pada data. Sesuatu yang secara nasional belum ada, sebab penentuan peringkat kemiskinan maupun penerima bantuan sosial hingga kini hanya diketahui institusi pengelolanya.

Proses advokasi di level nasional yang sudah mulai kami lakukan, tentu akan berlanjut tahun berikutnya. Bukan semata agar model yang kami tawarkan dirujuk. Lebih besar dari itu, tujuannya adalah agar pemerintah pusat mau memperhatikan kepentingan unit pemerintahan yang paling terkena dampak dari bias kepentingan data di level nasional, yaitu desa.

- Pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) "Satu Data Kemiskinan: Bagaimana Mencapainya dan untuk Siapa?" pada Selasa, 24 September 2019 di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari tingkat daerah hingga nasional.



The advocacy process at the national level that we have begun to carry out will certainly continue in the following year. Not merely in order to make the model we offer is referred. Bigger than that, the aim is for the central government to pay attention to the interests of the government unit most affected by the bias of data interest at the national level, namely villages.

- "One Data on Poverty: How to Achieve it and for Whom?" on Tuesday, September 24, 2019 in Jakarta. This activity involved stakeholders ranging from regional to national level.

For further information:



SCAN ME

“

Dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih pendataan, sebenarnya beberapa daerah telah mampu mengisi kekosongan dan ketidakpastian dalam soal data, melalui model yang mereka kembangkan sendiri. Salah satunya Kabupaten Gunungkidul.

”

“

Regarding overlapping data, some regions actually have been able to fill in the gaps and uncertainties in the matter of data, through their own developed models. One of them is Gunungkidul Regency.

”

••• 3

••• 3

Literasi Digital: Memberdayakan Perempuan, Memangkas Kesenjangan Digital



Digital Literacy: Empowering Women, Bridging Digital Divide



Sebagian besar negara di dunia saat ini, termasuk Indonesia, memang tengah menikmati beragam kemudahan dan perubahan hidup berkat teknologi digital. Walakin, satu hal yang ternyata tidak berubah adalah perempuan tetap menjadi salah satu kelompok yang rentan dan terabaikan dalam dinamika perkembangan tersebut. Perempuan adalah kelompok paling rawan mengalami kejahatan berbasis siber. Kaspersky Lab dan B2B International dalam kajiannya mengungkapkan bahwa perempuan lebih berisiko kehilangan data pribadi di perangkat *mobile* atau gawai, dibanding pria.

Kajian itu juga menyebutkan bahwa meski lebih dari seperempat perempuan yang diwawancara merasa khawatir tentang keamanan daring foto-foto di ponselnya, pada kenyataannya masih banyak yang belum menerapkan langkah-langkah keamanan yang paling dasar sekalipun. Banyak perempuan yang masih belum

Most countries in the world today, including Indonesia, are indeed enjoying a variety of conveniences and life changes due to digital technology. However, one thing that has not changed is that women remain one of the most vulnerable and neglected groups in this dynamic. Women are the most vulnerable group for experiencing cyber-based crime. Kaspersky Lab and B2B International in their study revealed that women are more at risk of losing personal data on mobile devices, compared to men.

The study also said that although more than a quarter of the women interviewed were concerned about the online safety of photos on their cellphones, in fact a lot of them had not implemented even the most basic security step. Many women still do not understand how vulnerable they are to cyber-attacks. Only 19 percent believe they can be targeted, lower than men who reach 27 percent.

memahami seberapa rentannya mereka terhadap serangan siber. Hanya 19 persen yang percaya bahwa mereka bisa menjadi target, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 27 persen.

Pengalaman kami selama menggeluti tata kelola data (*data governance*) dan literasi media melalui media komunitas, akhirnya membawa kami pada temuan serupa. Itulah yang mendasari kami mulai serius merancang literasi digital bagi perempuan. Kami sadar ini akan jadi gerakan panjang, butuh banyak energi sekaligus sunyi, sebab kami tidak mengambil pendekatan berbasis proyek yang berorientasi “terlaksananya kegiatan.”

Kami berupaya merancang literasi digital bagi kelompok perempuan yang berkelanjutan dan berdampak nyata pada perubahan. Itu sebabnya kami mencari model pendekatan dan materi yang tepat dengan menggelar belajar bersama beberapa kelompok ibu-ibu di pedesaan. Selama dua tahun terakhir, kami menyelenggarakan tujuh kali pelatihan keamanan digital, yang seluruh pesertanya adalah ibu rumah tangga.

Kami pun akhirnya menemukan mitra sekaligus simpul yang pas untuk kolaborasi, yaitu Taman Baca Masyarakat (TBM), setelah sebelumnya pada 2018 kami mencoba berkolaborasi dengan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selama 2019 ada tiga taman baca yang berkolaborasi dengan kami yaitu TBM Delima (Jetis, Bantul), TBM Teras Baca Guyub Rukun dan TBM Helicopter GoBook Maos (Sedayu, Bantul). Kami pun lantas mulai menjalin komunikasi dengan para pengurus taman baca di Daerah Istimewa Yogyakarta guna menjajaki potensi kolaborasi lain.

Dalam kurun dua tahun dan setelah melalui *trial and error*, kami dapat menyimpulkan pemahaman dasar yang dibutuhkan oleh mereka setidaknya ada tiga, yaitu keamanan data pribadi di internet (khususnya di media sosial), etika bermedia sosial, dan cara mengamankan gawai.

Pelatihan keamanan digital akan menjadi salah satu agenda utama kami hingga beberapa tahun ke depan, mengingat masih begitu besarnya kebutuhan literasi digital oleh kelompok perempuan. Sementara di sisi lain, pemerintah belum sepenuhnya menjangkau mereka. Dilihat dari sudut pandang manapun, posisi warga belumlah setara saat berhadapan dengan korporasi digital terkait dengan isu keamanan data.

Padahal posisi yang setara ini menjadi keniscayaan bila ingin warga berdaya dalam dunia digital dan mengambil keputusan berdasar pemahaman, termasuk saat datanya dikumpulkan oleh korporasi maupun negara. Memangkas kesenjangan, sedikit demi sedikit, menjadi fokus kami dalam aktivitas keamanan digital untuk perempuan untuk mendorong warga ke posisi yang lebih setara.

Our experience in managing data governance and media literacy through community media finally led us to similar findings. That's why we start to seriously design digital literacy for women. We are aware that this will be a long movement, it takes a lot of energy and quietness at the same time, because we don't take a project-based approach whose orientation is "carrying out activities."

We strive to design digital literacy for women's groups that is sustainable and has a real impact on change. That is why we are looking for the right approach and material by holding a study with several groups of mothers in rural areas. Over the past two years, we have held seven digital security training sessions, all of the participants are housewives.

We finally found the right partner and the right knot for collaboration, namely community library or TBM, after previously in 2018 we tried to collaborate with Family Welfare Empowerment (PKK) group. During 2019 there were three community libraries collaborating with us, namely TBM Delima (Jetis, Bantul), TBM Teras Baca Guyub Rukun and TBM Helicopter GoBook Maos (Sedayu, Bantul). We then began to establish communication with the community library managers in the Special Region of Yogyakarta to explore other potential collaborations.

Within two years and after going through trial and error, we could conclude at least three basic understanding needed by them, namely the security of personal data on the internet (especially on social media), the ethics of social media, and how to secure a device.

Digital security training will be one of our main agendas for the next few years, due to the large needs of digital literacy for women's groups. While on the other hand, the government has not fully reached them. Viewed from any perspective, the citizens' position is not yet equal when dealing with digital corporations related to data security issues. Whereas this equal position becomes a necessity if we want citizens to be empowered in the digital world and make decisions based on understanding, including when the data is collected by corporations and the states. Bridging the gaps, little by little, is our focus in digital security activities for women for pushing citizens to a more equal position.



○ Suasana kegiatan literasi digital selama 2019 bersama tiga taman baca yang berkolaborasi dengan CRI yaitu TBM Delima (Jetis, Bantul), TBM Teras Baca Guyub Rukun dan TBM Helicopter GoBook Maos (Sedayu, Bantul).

○ The situation of digital literacy activities during 2019 with three community library (TBM) collaborating with CRI, namely TBM Delima (Jetis, Bantul), TBM Teras Baca Guyub Rukun and TBM Helicopter GoBook Maos (Sedayu, Bantul).



For further information:



SCAN ME

“

Padahal posisi yang setara ini menjadi keniscayaan bila ingin warga berdaya dalam dunia digital dan mengambil keputusan berdasar pemahaman, termasuk saat datanya dikumpulkan oleh korporasi maupun negara. Memangkas kesenjangan, sedikit demi sedikit, menjadi fokus kami dalam aktivitas keamanan digital untuk perempuan untuk mendorong warga ke posisi yang lebih setara.

”

“

Whereas this equal position becomes a necessity if we want citizens to be empowered in the digital world and make decisions based on understanding, including when the data is collected by corporations and the states. Bridging the gaps, little by little, is our focus in digital security activities for women for pushing citizens to a more equal position.

”

....4

Griya Jagadhaya

Di tahun pertamanya beroperasi, Griya Jagadhaya, salah unit penggalangan dana yang kami gagas, menunjukkan perkembangan. Griya Jagadhaya, sebagai penyedia jasa akomodasi dan pelatihan, mulai dikenal dan dimanfaatkan oleh publik. Selain dapat dimanfaatkan oleh publik, Griya Jagadhaya juga kerap digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para mitra kami. Hal ini tentu menjadi indikasi positif.

Mengelola sebuah unit bisnis memang bukan hal mudah bagi LSM seperti kami. Untuk membuatnya berkembang membutuhkan perubahan pola pikir; dari non-profit menjadi profit. Sementara itu pada saat yang sama, kami harus konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Beberapa prinsip tidak cocok untuk praktik yang berorientasi bisnis, misalnya, mengenai manajemen sumber daya manusia.

Dibutuhkan perubahan pola pikir dari nirlaba menjadi berorientasi laba, sementara di saat yang sama masih harus menerapkan model manajemen lembaga nonprofit. Seni untuk menyelaraskan semua nilai dan tujuan ketika menjalankan unit bisnis adalah pembelajaran paling berharga bagi kami.

Harapan di masa mendatang, Griya Jagadhaya dapat menjaga nyala semangat kami untuk terus mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

....4

Griya Jagadhaya

Griya Jagadhaya, one of our latest fundraising units, showed progress in its first year of operation. As a provider of accommodation and training services Griya Jagadhaya is becoming known and accessed by the public. Not only provide its service to the public, Griya Jagadhaya is also used as a training ground by our partners. This is certainly a positive indication.

We still need to learn more on how to manage a business unit. We need an entrepreneur mindset to gain more profit. Meanwhile, at the same time, we must consistently apply the principles that this organization highly holds. Some principles are not suitable for business-oriented practices, for example, regarding human resource management.

Implementing a profit mindset for a non-profit organisation is always challenging. The art of aligning all values and goals when running a business unit is the most valuable learning for us.

We hope Griya Jagadhaya can play an important role in our effort to realize our vision.



○ Sepanjang tahun 2019, Griya Jadhaya telah dikenal sebagai tempat penginapan dan pusat pelatihan.

○ Throughout 2019, Griya Jadhaya has been known as an accommodation and training center.

COMBINE RESOURCE INSTITUTION

Laporan Keuangan / Financial Report 2019

AKTIVA (ASSETS)	
AKTIVA LANCAR (CURRENT ASSETS)	
Kas dan Setara Kas (Cash and Equivalent)	530.997.843,42
Piutang (Receivables)	104.172.600,00
Investasi (Invesment)	2.750.000.000,00
JUMLAH ASET LANCAR (CURRENT ASSET TOTAL)	3.385.170.443,42
AKTIVA TIDAK LANCAR (NON-CURRENT ASSETS)	
Aset Tetap (Fixed Assets)	2.021.768.287,00
Akumulasi Depresiasi (Accumulated Depreciation)	(907.399.657,28)
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR (NON-CURRENT ASSET TOTAL)	1.114.368.629,72
TOTAL AKTIVA (ASSETS TOTAL)	4.499.539.073,14

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH (LIABILITAS & NET ASSETS)	
HUTANG (LIABILITIES)	
Potongan Pajak PPh 23 (Withholding tax PPh 23)	391.750,00
Biaya yg ditangguhkan (Deffered Charges)	2.225.673,00
Dana Masa kerja	108.345.287,00
TOTAL HUTANG (LIABILITIES TOTAL)	110.962.710,00
AKTIVA BERSIH (NET ASSETS)	
Tidak terikat (Unrestricted)	3.773.295.023,16
Terikat Sementara (Temporary Restricted)	615.281.339,98
Terikat (Restricted)	0,00
TOTAL AKTIVA BERSIH (NET ASSETS TOTAL)	4.388.576.363,14
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH (LIABILITAS & NET ASSETS TOTAL)	4.499.539.073,14

PENERIMAAN & PENGELUARAN (INCOME & EXPENSES)	
PENERIMAAN (INCOME)	
Penerimaan Swadaya/Tidak Terikat (Income Unrestricted)	2.655.356.365,22
Penerimaan dari donor/Terikat Temporer (Income Temporary Restricted)	3.240.418.154,11
TOTAL PENERIMAAN (INCOME TOTAL)	5.895.774.519,33
PENGELUARAN (EXPENSES)	
Program Swadaya (Swadaya Program)	1.855.060.506,26
Program Ford Foundation (Ford Foundation Program)	2.715.720.311,00
TOTAL PENGELUARAN (EXPENSES TOTAL)	4.570.780.817,26

Penerimaan Swadaya/Tidak Terikat (Income Unrestricted) Tahun 2019	
Sumbangan (Donation)	2.128.751.351,00
Jasa Konsultasi (Consulting services)	46.796.000,00
Unit Usaha (Business unit)	68.747.044,00
Investasi (Investation)	107.616.768,50
Barang dagangan (Merchandise)	7.091.000,00
Lainnya (Other income)	296.119.201,725
Total Penerimaan Swadaya/Tidak Terikat (Income Unrestricted Total)	2.655.121.365,226

laporan belum diaudit

Dewan Pembina dan Staf

Dewan Pembina : Dodo Juliman

Dewan Pengawas : Agustiawan Syahputra

Dewan Pelaksana : Delima Kiswanti, Mulya Amri, Ahmad Nasir

Direktur: Imung Yuniardi

I. Unit Pengelolaan Sumber Daya Komunitas

Manajer : Elanto Wijoyono

Staf Analis Regulasi : Irman Ariadi

Staf Pemanfaatan Sistem Informasi : Muhammad Amrun

Staf Advokasi dan Pendidikan Komunitas : Valentina Sri Wijiyati

II. Unit Pengelolaan Informasi Komunitas

Manajer : Ferdhi F. Putra

Staf Pengelolaan Pengetahuan : Maryani

Staf Multimedia : Aris Harianto

Staf Komunikasi : Lamia Putri Damayanti

III. Unit Sekretariat

Manajer : Mary T. Prestiningsih

Staf Akuntansi : Rita Oktavianti

Kasir : Ulfah Hanani

Koordinator Administrasi dan Rumah Tangga: Rani S Siregar

Staf Rumah Tangga : Sarjiman

Staf Keamanan : Suris Meidianto

IV. Unit Pengembangan Ekonomi Kreatif

Koordinator : Anton Hadiyanto

Staf Pusat Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif : Menik Siti Solikhah

Staf Tata Graha Griya Jagadhaya : Funky Prawira, Maryanto

V. Unit Teknologi Informasi

Koordinator: Zani Noviansyah

Staf Pengembangan Sistem Informasi : Rizka Himawan

Staf Teknologi Informasi Komunikasi : Dennis Arista

Boards and Staffs

Governing Board : Dodo Juliman

Supervisory Board : Agustiawan Syahputra

Executive Board : Delima Kiswanti, Mulya Amri, Ahmad Nasir

Director : Imung Yuniardi

I. Community Based Resource Management Unit

Manager : Elanto Wijoyono

Regulation Analyst Staff : Irman Ariadi

Information System Utilization Staff : Muhammad Amrun

Community Advocacy and Education Staff : Valentina Sri Wijiyati

II. Community Based Information Management Unit

Manager : Ferdhi F. Putra

Knowledge Management Staff : Maryani

Multimedia Staff : Aris Harianto

Communication Staff : Lamia Putri Damayanti

III. Secretariat Unit

Manager : Mary T. Prestiningsih

Accounting Staff : Rita Oktavianti

Cashier : Ulfah Hanani

Household and Administration Coordinator : Rani S Siregar

Household Staff : Sarjiman

Security Staff : Suris Meidianto

IV. Creative Economy Development Unit

Coordinator: Anton Hadiyanto, Rita Octaviani

Creative Economy Development Training Center Staff : Menik Siti Solikhah

Cleaning Service Griya Jagadhaya Staff : Funky Prawira, Maryanto

V. Information Technology Unit

Coordinator : Zani Noviansyah

Information System Development Staff : Rizka Himawan

Information Technology Staff : Dennis Arista



Jalan KH Ali Maksum 462
Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55188
Telp/Fax: 0274-411123
Email: office@combine.or.id
Website: www.combine.or.id

Facebook: /combinerесурсеinstitution
Twitter: @combineRI
Youtube: /combinerесурсеinstitution
Instagram: @combineRI
WhatsApp: +62 81 804 389 000

Combine Resource Institution

Jalan KH Ali Maksum 462
Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, 55188
Telp/Fax: 0274-411123
Email: office@combine.or.id
Website: www.combine.or.id

Facebook: /combinerесурсеinstitution
Twitter: @combineRI
Youtube: /combinerесурсеinstitution
Instagram: @combineRI
WhatsApp: +62 81 804 389 000

